

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat disimpulkan bahwa bank adalah salah satu lembaga penting bagi suatu negara. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Jenis-jenis bank di Indonesia sangatlah beragam, dilihat dari sisi fungsi, kepemilikan, pengenaan bunga, dan kegiatannya di bidang devisa. Berdasarkan fungsinya, bank di Indonesia di bagi menjadi tiga, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR). Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 pasal 1, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum memiliki beberapa kegiatan usaha, salah satunya adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Siamat, 2005). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat kewajiban membayar bunga atas pinjaman yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah. Bunga tersebut merupakan salah satu pendapatan bagi bank. Oleh karena itu, pemberian kredit merupakan suatu pendapatan bagi bank. Semakin besar kredit yang diberikan kepada nasabah, maka semakin besar pula bunga yang didapatkan oleh bank.

Perbankan adalah media yang menjembatani antara sektor moneter dengan sektor riil. Perbankan merupakan intermediasor antara sektor moneter dengan sektor riil. Perbankan merupakan intermediasor dalam menampung dana yang berlebih dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Peran perbankan dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk membantu pengalokasian agar alokasi dana dapat efisien. Selain itu, perbankan juga memiliki kemampuan untuk mengetahui masalah informasi asimetris yang terjadi di pasar kredit. Sebagai penghubung antara investor dan pengusaha, perbankan mampu memberikan informasi yang seimbang antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat dari fungsi bank sebagai perantara (*intermediary*), sehingga kepercayaan masyarakat luas sebagai nasabah kian bertambah (Abidan ,2007).

Sektor perbankan dalam keberadaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, terutama kondisi moneter. Fenomena krisis moneter dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengakibatkan bank enggan untuk mengucurkan dana kreditnya ke sektor pelaku usaha. Dalam keadaan seperti ini, bank lebih memilih untuk mengalokasikan dana atau kreditnya kepada sektor yang dianggap lebih aman dan meyakinkan. Sebagai contoh, peristiwa krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, kredit perbankan mengalami volume penurunan yang cukup tajam. Dengan demikian, berdampak pada beberapa sektor yang mempengaruhinya, terutama pada sektor riil. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penentu pemulihan kondisi perekonomian pascakrisis moneter yang berjalan lebih lambat dibanding negara-negara di Asia lainya seperti Korea Selatan dan Thailand (Juda, 2001).

Menurunnya kredit perbankan dapat disebabkan dari faktor permintaan ataupun penawaran kredit. Dari sisi penawaran misalnya, penarikan dana nasabah yang ada di bank secara bersamaan (*bank rush*) dan meningkatnya kewajiban pembayaran terhadap luar negeri menjadi pemicu awal terjadinya penurunan kredit perbankan. Sementara itu, ketika suku bunga dan nilai tukar rupiah melonjak tajam para investor perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memperoleh pendanaan utama dari perbankan menambah persoalan berupa meningkatnya jumlah kredit macet yang cukup tinggi nilainya. Di sisi lain, tingginya suku bunga juga mengakibatkan merjin bunga (selisih antara suku bunga kredit dengan deposito) yang bernilai negatif akan menurunkan rasio kecukupan modal (CAR) perbankan secara drastis. Kesulitan likuiditas yang

dialami oleh perbankan dan perusahaan akan menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak ini menjadi terganggu dan berdampak pada kebutuhan pendanaan di sektor riil yang menjadi semakin terbatas.

Di sisi permintaan, penurunan kredit perbankan dapat terjadi karena rendahnya prospek investasi (*investment oppotunitesm*) dan konsumsi, serta belum pulihnya kondisi finansial perusahaan. Kondisi ini tercermin dari masih tingginya rasio hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut. Rendahnya prospek investasi dan konsumsi ini tercermin dari masih tingginya rasio hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut. Rendahnya prospek investasi dan konsumsi ini tercermin dari porsi posisi kredit investasi dan konsumsi pada bank pemerintah dan swasta nasional.

Sampai awal tahun 2001, kondisi sektor perbankan menunjukkan adanya indikasi perbaikan. Hal ini dilihat dari membaiknya permodalan secara agregat dan marjin tingkat suku bunga yang bernilai positif. Di sisi lain kondisi ini tidak diikuti dengan meningkatnya porsi penyaluran kredit perbankan, kondisi yang seperti ini dinamakan sebagai *credit crunch*, yakni penurunan kemauan/keinginan perbankan dalam menyalurkan kredit tanpa diikuti kenaikan tingkat bunga pinjaman (Abidan, 2004). Keadaan *credit crunch* terjadi karena perbankan merasakan risiko yang tinggi dan keuntungan yang rendah apabila menyalurkan kredit ke masyarakat.

Perilaku perbankan sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya kebijakan moneter dan sebaliknya. (Abidan, 2007) berpendapat bahwa perilaku perbankan dalam menyikapi penawaran dan permintaan kredit dalam perekonomian sangat penting dalam paradigma moneter yang baru. Perilaku ini dapat dilihat dari kuantitas kredit yang disalurkan dan dari harga (tingkat bunga kredit yang ditetapkan). Perilaku perbankan yang cenderung menghindari risiko akan sangat berpengaruh terhadap penyaluran kredit, maka pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada usaha dalam negeri akan mengalami keterhambatan.

Salah satu kegiatan utama lembaga keuangan termasuk bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sumber penerimaan utama bank yang diharapkan pun juga berasal dari penyaluran kredit. Mengingat penyaluran kredit tergolong aktiva aktif atau penerimaannya tinggi, maka sebagai konsekuensinya, penyaluran kredit juga mengandung risiko yang lebih tinggi.

Volume kredit yang disalurkan oleh perbankan antara lain juga dipengaruhi oleh rasio kecukupan modal perbankan, yaitu CAR (*Capital Adequacy Ratio*). CAR adalah tingkat kecukupan modal yang diukur berdasarkan perhitungan *capital adequacy*. Perhitungan *adequacy* ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanam modal yang mengandung risiko, harus menyediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu (*risk margin*).

Menurut peraturan bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bahwa setiap bank wajib menyediakan modal minimum 8 persen dari aktiva tertimbang menurut risiko yang diprosikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Apabila ketentuan ini tidak dipatuhi maka bank Indonesia akan menempatkan bank tersebut ke dalam pengawasan khusus Bank Indonesia akan menempatkan bank tersebut ke dalam pengawasan khusus bank Indonesia. CAR yang tinggi mencerminkan stabilnya jumlah modal dan rendahnya risiko yang dimiliki oleh bank sehingga memungkinkan bank untuk bisa lebih banyak menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Dengan kata lain terdapat hubungan CAR dengan penyaluran kredit yang searah (Meydianawati, 2007).

Besarnya CAR dan volume kredit perbankan sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. CAR adalah tingkat kecukupan modal yang diukur berdasarkan perhitungan *capital adequacy*. Besaran CAR dipengaruhi besarnya modal inti dan modal pelengkap yang dimiliki perbankan. Selain itu, besarnya CAR juga didasarkan pada tingkat suku bunga tabungan dan deposito perbankan, sedangkan volume kredit dipengaruhi tingkat bunga kredit. Dalam menetapkan tingkat bunga kredit, selain memperhatikan faktor risiko, bank juga mengacu pada tingkat bunga instrumen moneter, yaitu tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (*BI-rate*). SBI merupakan instrumen pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter.

Besarnya bunga yang ditawarkan untuk simpanan akan sangat berpengaruh terhadap bunga pinjaman. Dalam Industri perbankan yang sangat

kompetitif ini, penentuan tingkat suku bunga kredit menjadi suatu alat persaingan yang sangat strategis. Bank-bank yang mampu mengendalikan komponen-komponen pokok dalam penentuan tingkat suku bunga kredit (*lending rate*) akan mampu menentukan tingkat bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank lain yang tidak mampu untuk mengendalikan komponen-komponen pokok dalam penentuan tingkat suku bunga kredit (*lending rate*). Komponen-komponen yang menentukan tingkat bunga kredit antara lain adalah *Cost of Loanable funds*, *Overhead cost*, *Risk Factor*, *spread*, dan pajak. Hal inilah yang menyebabkan rentang atau jarak antara SBI selaku suku bunga acuan dengan suku bunga simpanan maupun pinjaman cukup jauh nilainya.

Jenis-jenis bank di Indonesia sangatlah beragam, dilihat dari sisi fungsi, kepemilikan, pengenaan bunga, dan kegiatan di bidang devisa. Berdasarkan fungsinya, bank di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR). Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 pasal 1, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum memiliki beberapa kegiatan usaha, salah satunya adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga (Siamat, 2005). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat kewajiban membayar bunga atas pinjaman yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah. Bunga tersebut merupakan salah satu pendapatan bagi bank. Oleh karena itu, pemberian kredit merupakan suatu pendapatan bagi bank. Semakin besar kredit yang diberikan kepada nasabah, maka semakin besar pula bunga yang didapatkan oleh bank.

Tabel 1.1

Perkembangan Kredit UMKM, CAR, SBI, DPK dan GDP Indonesia periode tahun 2013-2017

Tahun	Kredit UMKM (Milyar Rp)	CAR (%)	SBI (%)	DPK (Milyar Rp)	GDP (Milyar Rp)
2013	608.823	18,13	7,5	3.663.968	8.156.498
2014	671.721	19,57	7,75	4.114.420	8.564.867
2015	739.801	21,39	7,5	4.413.056	8.982.517
2016	802.113	22,93	4,75	4.834.758	9.434.613
2017	882.982	23,18	4,25	5.289.209	9.912.704

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa CAR, DPK dan Kredit UMKM pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan. Sedangkan DPK dapat kita ketahui bahwasanya mengalami perubahan yang stabil sama hasilnya dengan kredit UMKM juga mengalami perubahan yang stabil dimana DPK mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah DPK pada Bank Umum Konvensional yaitu 5.289.209 M dengan jumlah CAR 23,18% dan diikuti dengan Kredit UMKM yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 882.982 M. Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa antara CAR, DPK, dengan Kredit UMKM mengalami

pergerakan yang searah dimana pergerakan tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Penggolongan kredit dibagi berdasarkan jangka waktu (*maturity*), barang jaminan (*collateral*), segmen usaha, tujuan kredit, dan penggunaan kredit (Siamant, 2005). Berdasarkan penggunaannya, kredit dibagi menjadi dua, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), dan kredit investasi. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh bank guna menambah modal kerja debitur (Siamat, 2005). Pada prinsipnya kredit modal kerja ini adalah penggunaan modal yang dimulai dari perolehan modal dari kredit bank, kemudian dana tersebut digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan baku yang akan diolah untuk membuat produk, lalu produk dijual, dan sampai mendapatkan dana kas dari hasil penjualan tersebut.

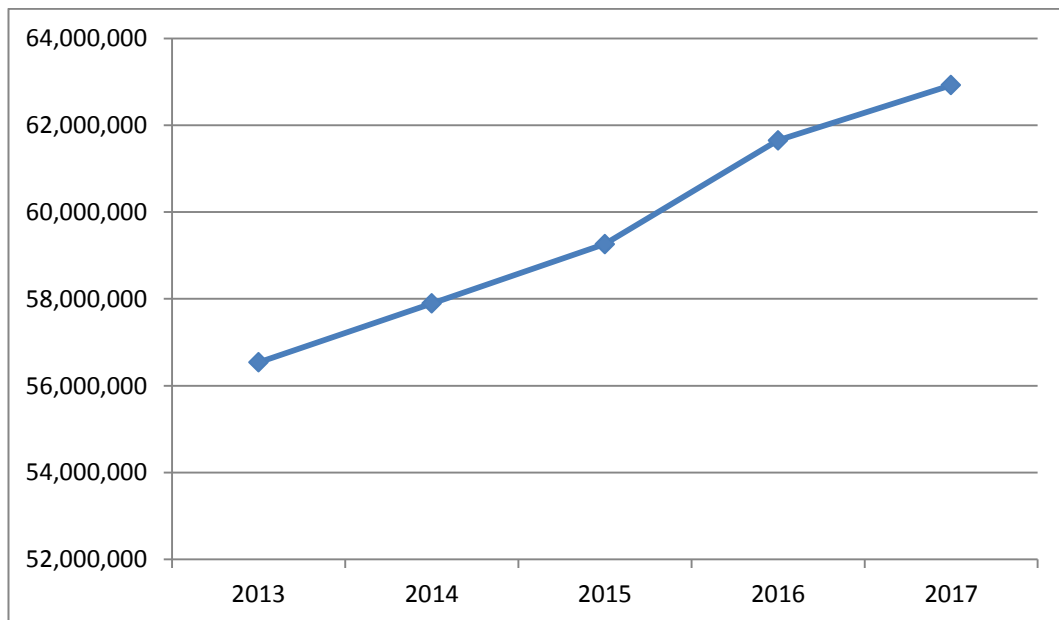
Salah satu tujuan kredit modal kerja adalah memberikan kredit pada UMKM. Kredit UMKM adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Definisi dan kriteria tersebut telah diatur dalam UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM. Kredit UMKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian negara yang dijalankan melalui bank. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh modal untuk membangun UMKM. Dengan kata lain, kredit UMKM diberikan oleh bank kepada debitur sebagai penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan pihak bank.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu kelompok usaha yang di mana sering menggunakan sumber dayanya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. UMKM ini merupakan kelompok usaha yang memiliki keunggulan dalam sisi penyerapan tenaga kerjanya yang banyak, sehingga dapat membantu proses pemerataan yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi negara (Anggraini, 2013).

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai usaha dalam memajukan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kinerja UMKM. Seperti dalam intruksi presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Hal tersebut disebabkan sejalan dengan perkembangan jumlah UMKM di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ketahun. Sehingga pemerintah melihat adanya kesempatan dan potensi yang baik dalam memaksimalkan sektor UMKM ini. Selain itu, untuk meningkatkan sektor riil dengan cara memberdayakan UMKM guna menciptakan lapangan pekerjaan, dan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM tersebut mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKM, dan reformasi regulasi UMKM. Adapun data mengenai pesatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia pada tahun 2016-2017 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Perkembangan UMKM di Indonesia periode tahun 2013-2017



Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM.

Berdasarkan diagram di atas perkembangan UMKM di Indonesia pada periode tahun 2013 yaitu sebanyak 56.534.592 unit sampai 2017 yaitu sebanyak 62.922.617 unit mengalami peningkatan dari sisi jumlah. Dengan adanya perkembangan jumlah UMKM dalam satuan unit, hal tersebut berpengaruh juga terhadap jumlah tenaga kerja yang dapat di serap oleh UMKM terus mengalami peningkatan. Tetapi hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang mengalami kenaikan pada periode tahun 2013 sampai dengan 2017 dimana pertumbuhan jumlah UMKM.

UMKM sangatlah penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hal ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, yaitu UMKM dapat bertahan dari krisis ekonomi tersebut, sedangkan perusahaan-perusahaan besar mengalami kolaps akibat krisis. Terdapat beberapa faktor yang membuat

usaha kecil menengah bertahan dari segala krisis, yaitu UMKM tidak memiliki utang luar negeri, UMKM dianggap *unbankble* sehingga tidak banyaknya utang kepada perbankan, penggunaan input lokal, dan UMKM berorientasi ekspor.

Modal UMKM didapatkan dari dua sumber yaitu internal dan eksternal. Modal Usaha internal biasa didapat dari modal sendiri, sehingga bisa dikatakan terbatas dan tidak berkembang, sedangkan modal eksternal biasanya didapat dari kredit. Sulitnya mendapatkan kredit bank memiliki berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya angunan yang diberikan oleh pihak UMKM yang menyebabkan pihak bank menolak untuk memberikan kredit. Selain itu, belum optimalnya sinergisitas antar pihak terkait dengan perbankan dan belum maksimalnya penggunaan database penyaluran kredit membuat percepatan perluasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jawa Tengah terhambat (Wardhana, 2013). Kemudian, terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak BPR untuk mengelola dan mengembangkan produk, terbatasnya jumlah modal yang dimiliki oleh BPR sehingga menghambat perluasan kredit di Provinsi Sumatera Barat (Herry, 2007).

Kemampuan bank dalam menyalurkan kredit tentu tidak terlepas dari rasio keuangan bank itu tersendiri, bahwa rasio keuangan bank (diantaranya *loan growth, securities/asset, lending standars*) berpengaruh terhadap pemeberian kredit, selain variabel makro ekonomi yaitu GDP. Sementara itu, beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit UMKM, antara lain: inflasi,

tingkat pertumbuhan ekonomi, dana pihak ketiga, hutang, ekuitas, profit, akses informasi, nilai jaminan.

Penyaluran kredit khususnya sektor UMKM dipengaruhi oleh nilai balik alokasi dana bank (Abidan, 2007). Hal tersebut sesuai dengan tingginya risiko berusaha yang dialami oleh pelaku sektor riil UMKM. Pada masa krisis, banyak perusahaan yang tidak kuat menanggung kurs dan tingkat suku bunga tinggi, seperti yang terjadi pada industri tekstil. Pada saat permintaan melonjak, di sisi lain harga bahan-bahan modal justru mengalami kenaikan yang berdampak pada inflasi, belum lagi keresahan sosial ekonomi, gangguan keamanan, penarikan dana dari perbankan secara berasamaan dan besar-besaran serta stagflasi. Di saat seperti, sektor UMKM memiliki kemampuan dan tetap bertahan serta memiliki kelebihan dalam menghadapi krisis.

Besarnya kredit UMKM yang disalurkan perbankan dipengaruhi perilaku bank dalam mengelola dananya serta bagaimana kebijakan pemerintah yang berlaku. Dengan melihat kondisi keadaan tersebut, penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana pengaruh variabel eksternal bank yaitu GDP dan tingkat suku bunga B.I-rate dan variabel internal bank yaitu DPK (dana pihak ketiga) dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap volume kredit UMKM yang di salurkan.

B. Rumusan Masalah

Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh besar di dalam perekonomian suatu negara. Sektor ini berfungsi sebagai lembaga perantara atau intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, perbankan juga menampung dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit/pinjaman (*loan supply*) untuk kegiatan sektor-sektor perekonomian yang potensial dan produktif.

Perilaku perbankan dalam mengelola portofolio berkaitan dengan prinsip keuntungan maksimum. Pada prinsip keuntungan maksimum, alokasi terbesar dana perbankan ada dalam bentuk pinjaman atau kredit (*loan portfolio*). Pertimbangan bank dalam mengelola portofolio ini tidak hanya dipengaruhi tingkat bunga yang sedang berlaku, prospek ekonomi, kondisi internal bank, kebijakan pemerintah, serta kondisi usaha yang terjadi (sektor riil). Namun juga dipengaruhi oleh perilaku bank dalam memaksimalkan labanya sesuai dengan karakteristik struktur pasar dimana bank beroperasi (Perry, 2004).

Di dalam menjalankan perannya bank pemerintah berfungsi untuk menjaga sistem intermediasi dan *agent of development* (sebagai alat pembangunan Negara). Berdasarkan data perbankan pemerintah dan swasta nasional yang berasal dari Statistik Perbankan Indonesia, diketahui bahwa ternyata kredit UMKM yang disalurkan perbankan swasta nasional memiliki porsi lebih besar dibanding kelompok bank pemerintah. Hal ini

mengindikasikan bahwa fungsi bank pemerintah sebagai lembaga intermediasi dan *agent of development* tidak berjalan secara optimal dan tidak dengan rencana pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dipandang mempengaruhi kredit bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh bank umum konvensional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku dari sisi internal dan eksternal perbankan yaitu GDP, BI-rate, CAR dan DPK di dalam menyalurkan kredit ke sektor UMKM.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh GDP terhadap penyaluran Kredit UMKM pada bank umum konvensional Indonesia periode 2013-2017.
2. Menganalisis pengaruh SBI terhadap penyaluran Kredit UMKM pada bank umum konvensional Indonesia periode 2013-2017.
3. Menganalisis pengaruh CAR terhadap penyaluran Kredit UMKM pada bank umum konvensional Indonesia periode 2013-2017.
4. Menganalisis pengaruh DPK terhadap penyaluran Kredit UMKM pada bank umum konvensional Indonesia periode 2013-2017.